

LEGISLATIVE PERFORMANCE AND LOCAL GOVERNANCE: EVALUATING THE ROLE OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES IN SOUTH TANGERANG

Oleh :

Ade Hadiono¹, Umi Kulsum²

¹*bah_ade67@gmail.com*, ²*umisept@gmail.com*

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Kemandirian Nusantara**

ABSTRAK

Kinerja lembaga legislatif daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi strategis dalam sistem pemerintahan daerah, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun demikian, dalam praktiknya kinerja DPRD seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas produk legislasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi DPRD. Informan penelitian terdiri dari anggota DPRD, unsur sekretariat dewan, serta pihak-pihak yang terkait dengan proses legislasi dan pengawasan di DPRD Kota Tangerang Selatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi yang belum optimal antara DPRD dan pemerintah daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi proses legislasi, serta penguatan mekanisme partisipasi publik guna meningkatkan kualitas kinerja DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Kata kunci: kinerja legislatif daerah, fungsi DPRD, tata kelola pemerintahan daerah, pengawasan kebijakan publik, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

Legislative performance at the local level represents an essential indicator in

achieving democratic and accountable local governance. The Regional House of Representatives (DPRD) plays a strategic role in the local government system through

its legislative, budgeting, and oversight functions. However, in practice, the performance of local legislative institutions often faces several challenges, including the limited quality of legislative outputs, institutional capacity constraints, and weak oversight mechanisms over the implementation of regional policies. This study aims to analyze the performance of members of the Regional House of Representatives of South Tangerang City in 2024 in carrying out their legislative, budgeting, and oversight functions.

This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies of official documents related to the DPRD. Research informants included members of the DPRD, officials from the legislative secretariat, and other stakeholders involved in the legislative and oversight processes within the South Tangerang City DPRD. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results indicate that the performance of the South Tangerang City DPRD in performing legislative, budgeting, and oversight functions has generally been carried out in accordance with existing regulations. However, several challenges remain, including limited human resource capacity, suboptimal coordination between the DPRD and the local government, and relatively low public participation in regional policymaking processes. Therefore, efforts are needed to strengthen institutional capacity, improve transparency in legislative processes, and enhance public participation mechanisms to improve the quality of legislative performance in supporting good local governance.

Keywords: *legislative performance, regional parliament, local governance, public policy oversight, community participation*

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan lembaga legislatif daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi utama dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Peran tersebut menjadikan DPRD sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) (Agranoff, 2003).

Dalam perspektif administrasi publik, kinerja lembaga publik merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja sektor publik dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel (Moynihan, 2008). Oleh karena itu, kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak hanya diukur dari jumlah produk legislasi yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah serta efektivitas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Secara normatif, fungsi DPRD telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan pemerintah daerah (Bovaird, 2003).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kinerja lembaga legislatif daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Studi yang dilakukan oleh (Budiardjo, 2008) menunjukkan bahwa lembaga legislatif di tingkat daerah seringkali menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kualitas produk legislasi daerah masih belum optimal karena minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan daerah (Hidayat, 2016).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, keberadaan DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembentuk peraturan, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan akuntabilitas pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan. Menurut (Rhodes, 1996), tata kelola pemerintahan modern menekankan pentingnya interaksi antara berbagai aktor pemerintahan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, efektivitas kinerja DPRD sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi representasi, deliberasi, serta pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja DPRD dalam berbagai konteks. Penelitian oleh (Prasojo, 2010) menunjukkan bahwa kinerja legislatif daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan serta kualitas sumber daya manusia anggota legislatif. Penelitian lain oleh (Said, 2015) menemukan bahwa efektivitas fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses informasi serta lemahnya mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah. Sementara itu, studi oleh (Grindle, 2017) menekankan bahwa keberhasilan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat bergantung pada dukungan sistem kelembagaan yang transparan dan partisipatif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah, kajian yang secara khusus menganalisis kinerja DPRD pada tingkat kota dalam konteks implementasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masih relatif terbatas. Selain itu, dinamika politik lokal dan hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah seringkali mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap terkait bagaimana kinerja DPRD pada tingkat daerah, khususnya di Kota Tangerang Selatan, dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif. Penelitian ini berupaya

mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis terhadap kinerja anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan partisipatif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kinerja lembaga legislatif daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali informasi secara komprehensif mengenai proses, dinamika, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Creswell, 2014)

Lokasi penelitian dilakukan di DPRD Kota Tangerang Selatan, dengan fokus pada aktivitas kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses penyelenggaraan fungsi DPRD. Informan tersebut meliputi anggota DPRD, pejabat sekretariat DPRD, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan aktivitas DPRD, seperti peraturan daerah, laporan kegiatan DPRD, serta dokumen pembahasan anggaran daerah.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh (Miles, 2014). Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. PEMBAHASAN

Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui fungsi ini, DPRD bersama kepala daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, tetapi juga kualitas regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Grindle, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Tangerang Selatan telah menjalankan fungsi legislasi melalui proses pembahasan dan pengesahan berbagai

peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Namun demikian, proses penyusunan regulasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam perumusan kebijakan serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan fungsi strategis DPRD dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks ini, DPRD memiliki peran untuk memastikan bahwa alokasi anggaran daerah digunakan secara efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Pollitt, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Tangerang Selatan secara aktif terlibat dalam proses pembahasan anggaran daerah. Namun demikian, efektivitas fungsi anggaran masih dipengaruhi oleh dinamika politik lokal serta keterbatasan kapasitas analisis kebijakan anggaran yang dimiliki oleh anggota DPRD.

Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan mekanisme penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Melalui fungsi ini, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta penggunaan anggaran publik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses informasi serta koordinasi yang belum optimal antara DPRD dan pemerintah daerah.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD telah berperan dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, peningkatan transparansi dalam proses legislasi dan penganggaran, serta

pengembangan mekanisme partisipasi publik guna meningkatkan kualitas kinerja legislatif daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R. &. (2003). *Collaborative public management*. Georgetown University Press.
- Bovaird, T. &. (2003). *Public management and governance*. Routledge.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Grindle, M. (2017). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Hidayat, S. (2016). *Politik lokal dan dinamika pemerintahan daerah*. Denpasar: Rajawali Press.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moynihan, D. P. (2008). *The dynamics of performance management*. Georgetown University Press.
- Pollitt, C. &. (2017). *Public management reform*. Oxford University Press.
- Prasojo, E. (2010). *Reformasi birokrasi dalam praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rhodes, R. A. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*.
- Said, M. (2015). Pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.